

Kampung Muram Sari sebagai Sentra Pengelola Administrasi Pemerintahan Unggulan di Kabupaten Merauke

Paul Adryani Moento¹, Hubertus Oja² Abdul Rizal³

^{1,2,3}Universitas Musamus, Merauke, Indonesia

*Corresponding Author: paulmoento@unmus.ac.id

Info Artikel

Diterima: 30/09/2022

Direvisi: 04/10/2022

Disetujui: 07/10/2022

Abstract. *Muram Sari Village is one of the villages in the Semangga District, Merauke Regency. This village has a population of 1,496 people with a growth rate of 0.61%. This number fluctuates from year to year, one of which is caused by the lack of population administration management so it is very important to make improvements. This condition is in line with the government program as outlined in the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages that the village has the authority to regulate its own village both in terms of government administration equipment, villages, village finances, customs, village development, village assets, government agencies, village-owned businesses and even the village government itself with the aim of having strong legality. A village that has a neat government administration system certainly involves village apparatus who are proficient and have mastery of technology in managing it. Village management involves all government officials, both at the sub-district and village levels. The apparatus should have optimal capabilities in carrying out their duties in supporting the government system. It is very appropriate if the village area becomes the target of implementing government and development activities, considering that the village government is the lowest government base in the government structure which will determine the success of a comprehensive National Development.*

Keywords: *Village Devices, Management, Administration*

Abstrak. Kampung Muram Sari merupakan salah satu kampung yang ada di Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Kampung ini memiliki penduduk sebanyak 1.496 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,61%. Jumlah ini bersifat fluktuatif dari tahun ketahun yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengelolaan administrasi kependudukan sehingga sangat penting untuk dilakukan perbaikan. Kondisi ini sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung bahwa kampung memiliki kewenangan untuk mengatur kampungnya sendiri baik dalam segi perangkat administrasi pemerintahan, kampung, keuangan kampung, adat istiadat, pembangunan kampung, aset kampung, badan usaha milik kampung bahkan pemerintah kampung itu sendiri dengan tujuan agar memiliki legalitas yang kuat. Kampung yang memiliki sistem administrasi pemerintahan yang rapih tentu melibatkan perangkat kampung yang mahir dan memiliki penguasaan teknologi dalam mengelolanya. Pengelolaan kampung melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kampung. Aparat hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam mendukung sistem pemerintahan. Sangat tepat jika wilayah kampung menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan kampung merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan yang sangat menentukan keberhasilan dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh.

Kata Kunci: Perangkat Kampung, Pengelolaan, Administrasi

How to Cite: Moento, P. A., Oja, H., & Rizal, A. (2022). Kampung Muram Sari sebagai Sentra Pengelola Administrasi Pemerintahan Unggulan di Kabupaten Merauke. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 338-342. <https://doi.org/10.37478/abdika.v2i4.2142>



Copyright (c) 2022 Paul Adryani Moento, Hubertus Oja, Abdul Rizal. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kampung Muram Sari merupakan salah satu kampung yang ada di Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Kampung ini memiliki penduduk sebanyak 1.496 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,61% (BPS, 2020). Jumlah ini bersifat fluktuatif dari tahun ketahun yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengelolaan administrasi kependudukan sehingga sangat penting untuk dilakukan perbaikan. Kondisi ini sejalan dengan program pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung bahwa kampung memiliki kewenangan untuk mengatur kampungnya sendiri baik dalam segi perangkat administrasi pemerintahan, kampung, keuangan kampung, adat istiadat, pembangunan

kampung, aset kampung, badan usaha milik kampung bahkan pemerintah kampung itu sendiri dengan tujuan agar memiliki legalitas yang kuat.

Kampung yang memiliki sistim administrasi pemerintahan yang rapih tentu melibatkan perangkat kampung yang mahir dan memiliki penguasaan teknologi dalam mengelolanya (Khumaidi, 2020). Pengelolaan kampung melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kampung. Aparat hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam mendukung sistim pemerintahan (Nawawi, 2018). Sangat tepat jika wilayah kampung menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan kampung merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan yang sangat menentukan keberhasilan dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh (Tarmidzi dan Arismiyanti, 2018).

Mengingat banyaknya aktifitas yang dijalankan oleh pemerintah kampung dalam artian meningkatkan pembangunan kampung melalui program-program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat sebagai aspek pemberdayaan kampung sehingga harus dimaksimalkan dengan pengelolaan administrasi yang handal. Salah satu aspek yang lebih diutamakan adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah kampung dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan (Hermawan *et.,al*, 2021). Hal ini dapat memudahkan masyarakat, pemerintah kampung maupun partisipasi kampung lain dalam melakukan sistim administrasi khususnya yang berhubungan dengan Kampung Muram Sari. Disamping itu, dapat memperkuat partisipasi masyarakat serta kelembagaan menjadi efektif (Dwijosusilo dan Shafiyah, 2020). Sejalan dengan penyusunan peraturan tentang pemerintahan kampung sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kenyataannya kampung bukan lagi dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan secara umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan masyarakat kampung ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi).

Pada umumnya pemerintah kampung beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya (Sugiman, 2018). Peranan mereka sangatlah penting dan banyak menentukan keberhasilan suatu unit pemerintahan kampung. Oleh sebab itu diperlukan aparat kampung yang benar-benar mampu, berkualitas, menguasai teknologi dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Keberadaan aparat kampung yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah distrik yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kampung yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan kampung mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu

memberikan pelayanan kepada masyarakat kampung, dan mampu meningkatkan daya saing kampungnya (Amantha, 2021).

Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan dua metode yaitu sosialisasi awal dan realisasi kegiatan pengabdian melalui penyuluhan. Kegiatan sosialisasi awal dilakukan agar membangun sinkronisasi dengan pemerintah kampung dan aparatnya guna mencapai kesepakatan bersama sebelum melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Tujuan penyuluhan dan pendampingan yaitu memberikan tambahan ilmu mengenai pentingnya pengelolaan administrasi kampung. Selanjutnya dilakukan penyuluhan di kantor Kampung Muram Sari dengan melibatkan kepala kampung, sekertaris kampung serta seluruh aparat kampung.

Hasil dan Pembahasan

Sistim administrasi kampung memegang peranan penting dalam pemerintahan. Semakin baik sistim administrasi maka semakin menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh kampung itu sendiri terutama aparat kampung.

A. Sosialisasi Awal Kegiatan

Pelaksanaan sosialisasi awal bertujuan agar menyamakan persepsi dan memberikan gambaran mengenai rencana pelaksanaan kegiatan. Pada tahapan ini pelaksana kegiatan meminta waktu atau kesediaan dari mitra untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan direspon positif oleh kepala kampung dan aparat kampung karena baru pertama kali dilakukan khususnya di Kampung Muram Sari. Harapan pemerintah kampung agar kegiatan seperti ini terus menerus dilakukan sebagai wujud perhatian dan kerja sama yang baik.



Gambar 1. Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat

B. Penyuluhan tentang Pentingnya Pengelolaan Administrasi Kampung

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan maksud agar memberikan gambaran dan edukasi tentang pentingnya pengelolaan administrasi kampung. Dalam kegiatan ini, kepala kampung dan aparat sangat merespon dengan baik serta antusias dalam mengikuti kegiatan sampai akhir. Ukuran keseriusan dari aparat kampung dapat dilihat dari hadirnya aparat kampung

serta banyaknya pertanyaan yang dilahirkan saat kegiatan berlangsung. Hasil diskusi dijelaskan pada aparat kampung bahwa sistim pengelolaan administasi merupakan ujung tombak dalam sistim pemerintahan. Dokumentasi penyuluhan tentang pentingnya administrasi kampung ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 2. Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan administrasi kampung

Pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan respon baik dari aparat kampung dan bahkan kedepannya dapat ditindak lanjuti dengan menggunakan sistim teknologi dan berkelanjutan. Selain itu, harapan dari mitra agar Kampung Muram Sari merupakan kampung percontohan terutama dalam pengelolaan administrasi kampung.

C. Monitoring dan Evaluasi

Setelah dilakukan penyuluhan di Balai Kampung Muram Sari, selanjutnya monitoring dan evaluasi. Monitoring akan dilaksanakan dengan melihat perkembangan setiap bulanya di balai kampung dan akan berdiskusi dengan kepala kampung mengenai dampak yang terjadi setelah dilakukan penyuluhan.



Gambar 3. Foto Bersama Dengan Aparat Kampung

Simpulan dan Tindak Lanjut

Kegiatan penyuluhan pengelolaan administrasi kampung sangat bernilai positif bagi aparat kampung di Kampung Muram Sari. Kegiatan ini dapat menambah wawasan aparat kampung mengenai pentingnya sistim administrasi kampung dan dampak yang terjadi apabila sistim administrasi

tidak terkelolah dengan baik. Tindak lanjut kegiatan ini untuk kedepannya adalah pelatihan dan pendampingan sistim administrasi berbasis teknologi.

Daftar Pustaka

- Amantha, G. K. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang)*. 47(1), 67–79.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Arismiyanti, T. dan I. (2018). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. *DIMAS*, 18, 129–142.
- BPS. (2020). Kabupaten Merauke Dalam Angka 2020. In *Bps Kabupaten Merauke*. Badan Pusat Statistik.
- Endang Hermawan, Dini Pebriyani, Dwi Nurita Julianty, Putri Safitri, G. T. L. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sidangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1).
- Kristyan Dwijosusilo, S. S. (2020). *Partisipasi Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*. 4(2), 143–156.
- Nawawi, M. (2018). Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur. *Aktual STIE Trisna Negara*, 16(1), 28–38.
- Nelli Fitri Khumaidi. (2020). *Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal*.
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Journal. Binamulia Hukum. 7(1), 82–95.